



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Ketertiban Umum

Skripsi

Oleh

Fadllih Nauval Dika Nurulloh

2013310063

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Ketertiban Umum

Skripsi

Oleh

Fadllih Nauval Dika Nurulloh

2013310063

Pembimbing

Kristian Widya Wicaksono S.Sos., M.Si.

Bandung

2018



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Fadlih Nauval Dika N
Nomor Pokok : 2013310063
Judul : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun
2004 Tentang Ketertiban Umum.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang sarjana
Pada Jumat, 20 juli 2018
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Hubertus Hasan Ismail, Drs., M.Si.

Sekretaris

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos.,M.Si.

:

Anggota

Dr. Dudung sumahdumin, SH., MPA.

:

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadlilh Nauval Dika Nurulloh

NPM : 2013310063

Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Ketertiban Umum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penelitian akademik yang berlaku

Penyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 21 Juni 2018



Fadlilh Nauval Dika Nurulloh

ABSTRAK

Nama : Fadllih Nauval Dka Nurulloh

NPM : 2013310063

Judul : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Ketertiban Umum

penelitian ini membahas evaluasi kinerja kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum yang berdampak pada ketertiban usaha Pedagang Kaki Lima pada ruas jalan Sriwijaya Kota Cimahi, dalam menilai Kinerja kebijakan, peneliti menggunakan kriteria Evaluasi dari William Dunn. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum merupakan peraturan yang di buat oleh pemerintah kota Cimahi guna mengatur ketertiban, salah satu yang diatur dalam perda ini adalah ketertiban usaha yang berkaitan dengan masalah yang di angkat oleh peneliti yaitu ketertiban dan keteraturan Pedagang Kaki Lima pada ruas jalan Sriwijaya Kota Cimahi.

Teori kriteria Evaluasi dari William Dunn yaitu: *effectiveness, efficiency, adequacy, equity, Responsiveness, dan appropriateness* akan digunakan sebagai alat analisa evaluasi dalam penelitian ini. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang selanjutnya di analisis menggunakan sistem coding. Hali ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam aktor penting yang berkaitan dengan masalah peneliti. Yaitu Pedagang Kaki Lima, sebagai objek yang di atur oleh perda, Satuan polisi Pamong praja sebagi penegak Perda dan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian, di anggap sebagai penanggung jawab Perda tentang ketertiban usaha.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum masih belum berjalan dengan optimal dalam menciptakan Ketertiban dan keteraturan terhadap Pedagang Kaki Lima. Pemerintah selaku pembuat kebijakan perlu merevisi berbagai kekurangan yang terdapat dalam Perda Ketertiban Umum, evaluasi yang dilaksanakan kiranya tidak hanya menjadi formalitas belaka, melainkan benar-benar menjadi sebuah rekomendasi dalam pembuatan kebijakan selanjutnya dan benar-benar dapat merekam permasalahan sebenarnya yang terjadi di lapangan. agar kinerja kebijakan dapat dicapai dengan optimal

Kata Kunci: *ketertiban usaha Pedagang Kaki Lima, Evaluasi kinerja kebijakan.*

ABSTRACT

Name : Fadllih Nauval Dika Nurulloh

NPM : 2013310063

Title : Evaluation of Local Regulation Cimahi Number 4 Year 2004 on Public Order

The purpose of this research is to evaluate the performance of policy of City Regulation Cimahi Number 4 Year 2004 On Public Order which have an impact on order of street seller business on Sriwijaya road Cimahi City, in assessing the policy performance, researcher using Evaluation criterion from William Dunn. The prupose of this research will asses the performance of City Regulation Cimahi Number 4 Year 2004 About Public Order policy which have an impact on street vendors of Sriwijaya road, Cimahi City by using William Dunn's criterion of evaluation. One of the points of Cimahi City Local Regulation No. 4 of 2004 on Public Order regulates the business order related to the issues raised by the researcher, namely order and regularity of street vendors on Cimahi City Sriwijaya road which will be the focus of this research

Using William Dunn's criterion of evaluation, this research will asses effectiveness, efficiency, ade-quacy, equality, Responsiveness, and conformity of City Regulation Cimahi Number 4 Year 2004 On Public Order which have an impact on street vendors of Sriwijaya road, Cimahi City. Type of research used is qualitative research with phenomenological approach which then processed using coding system. This is done to get important information related to the researcher's problem. Namely Street Traders, as an object that is administered by local regulation, Pamong Praja police force as enforcer of Perda and Department of Cooperatives, UKM, Trade and Industry, in gap as the responsible of law on business order.

The results of this study indicate that the Local Regulation of Cimahi City No-mor 4 of 2004 On Public Order is still not running optimally in creating Order and regularity on the Street Vendors. The government as a policymaker needs to revise the shortcomings contained in the Public Order Regulations, the evaluations carried out will not only be a mere formality, but actually become a recommendation in the next policy making and can actually record the real problems that occur in the field . so that policy performance can be achieved optimally.

Keywords: business order of street vendors, Evaluation of policy performance.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum”.

skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada penulis, kepada kedua orang tua saya Drs.Dedi Kuswandi dan Dra. Kartika Ratnawati, adik saya Stsuraya Nafisah Dika N dan Tsana Makarim Dika N, serta sahabat lainnya yang menjadi motivasi terbesar kepada peneliti untuk menyelesaikan tugas pendidikan dengan sebaik-baiknya. Tak lupa penulis sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih untuk dosen pembimbing peneliti Kristian Widya Wicaksono S.Sos.M.Si. yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan.

2. Ibu Dr. Tutik Rachmawati S.IP., MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
3. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
4. Segenap narasumber terkait dengan penelitian ini, yang telah memberikan informasi terkait untuk menjawab pertanyaan penelitian.
5. Keluarga rancabulan 11 yang telah memotivasi dan memberikan tempat untuk menimba pengetahuan non-formal.
6. Keluarga ADVANCE yang telah bekerjasama dalam melaksanakan tugas untuk membangun mental mahasiswa baru FISIP UNPAR 2014.
7. Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik (HMPSIAP) periode 2013-2014, yang telah bekerjasama dalam melaksanakan program kerja kemahasiswaan untuk memajukan kegiatan mahasiswa administrasi publik di dalam maupun di luar UNPAR.
8. Naila, Ujang Ramdan, Agil, Adim, Laras, Tono, sahabat yang selalu menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dan menemani siang malam saat tidak tahu harus kemana.
9. Monic, Donal, Fauzan, Alvin, firman, Made, Hans, Tommy, Aryo, Fahmi, Alex, Octav, Felix, Bram, Vano, Kayshan, dan kawan-kawan yang menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman dan keluarga besar Administrasi Publik dan FISIP UNPAR.
11. Semua pihak yang turut membantu, dan dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan semua pihak kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bandung, 11 Juli 2018

Fadlilh Nauval Dika Nurulloh

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Sistematika Penelitian	9
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Kebijakan Publik	11
2.1.1 Tahapan Proses Kebijakan Publik	13
2.2 Evaluasi Kebijakan	16
2.3 Model penelitian	24
BAB III	25
METODE PENELITIAN	25
3.1 Tipe Penelitian	25
3.2 Peran Peneliti	29

3.3	Lokasi Penelitian	30
3.4	Informan Penelitian	30
3.5	Variabel Penelitian	31
3.5.1	Operasionalisasi variable	31
3.6	Sumber Data	35
3.7	Prosedur Pengumpulan Data	36
3.7.1	Wawancara Mendalam.....	37
3.7.2	Pengumpulan Data Analisis Dokumen	38
3.7.3	Observasi.....	38
3.8	Analisis Data	39
3.9	Pengecekan Keabsahan Temuan	40
BAB IV		41
OBJEK PENELITIAN		41
4.1	Profil Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi	41
4.1.1.	Gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi	41
4.1.2.	Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi	43
4.1.3.	Kedudukan, Tugas, Fungsi, & Kewenangan Kedudukan Satpol PP dan Damkar	43
4.1.4.	Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar	46
4.2	Profil Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian, Kota Cimahi	47
4.2.1	Konsep oprasi dinas perdagangan koprasi ukm dan perindustrian .	47

4.2.2	Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian, Kota Cimahi.....	47
4.2.3	Struktur organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian, Kota Cimahi.....	48
4.2.4	Tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian, Kota Cimahi.....	49
4.2.5	Sasaran strategis	49
4.2.6	Tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan,	50
4.3	Gambaran Umum Kota Cimahi	50
4.3.1	Kondisi umum jalan Sriwijaya.....	51
BAB V.....		54
ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA.....		54
Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.....		54
5.1	Gambaran umum Perda Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.....	54
5.2	Evaluasi peraturan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum terhadap keteraturan dan ketertiban PKL	57
5.2.1	Efektivitas Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum terhadap PKL Jalan Sriwijaya Kota Cimahi (<i>EFFECTIVENES</i>).....	57
5.2.2	Efisiensi Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum terhadap PKL Jalan Sriwijaya Kota Cimahi (<i>EFFICIENCY</i>)	66
5.2.3	Kecukupan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum terhadap PKL Jalan Sriwijaya Kota Cimahi (<i>ADEQUACY</i>).....	78

5.2.4	Perataan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum terhadap PKL Jalan Sriwijaya Kota Cimahi (<i>EQUITY</i>)	90
5.2.5	Responsifitas Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum terhadap PKL Jalan Sriwijaya Kota Cimahi (<i>RESPONSIVENESS</i>)	106
5.2.6	Ketepatan/kelayakan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum terhadap PKL Jalan Sriwijaya Kota Cimahi (<i>APPROPRIATENESS</i>).....	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PKL Jalan Sriwijaya	5
Gambar 1.2 Kondisi jalan Sriwijaya	6
Gambar 1.3 Data PKL Pelanggar Perda.....	7
Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik	15
Gambar 2.2 Model Penelitian	24
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar	46
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Cimahi	48
Gambar 4.3 Letak Jalan Sriwijaya Kota Cimahi.....	52
Gambar 4.4 Kondisi Jalan Sriwijaya.....	53
Gambar 5.1 PKL jalan sriwijaya Cimahi	62
Gambar 5.2 PKL Pedagang Buah	62
Gambar 5.3 PKL Warung Gerobak.....	63
Gambar 5.4 Data PKL Pelanggar Perda.....	64
Gambar 5.5 Gerafik Jumlah Anggaran	72
Gambar 5.6 Foto Kegiatan Operasi Ketertiban	94
Gambar 5.7 Kegiatan Patroli Pagi.....	99
Gambar 5.8 Kegiatan Patroli Malam	99
Gambar 5.9 Kegiatan Sidang Pelanggaran Perda	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Evaluasi Kebijakan	22
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	34
Tabel 5.1 Wawancara Kuantitas PKL yang Berdagang di lokasi yang dilarang oleh Pemda Kota Cimahi.....	58
Tabel 5.2 Tabel wawancara Usaha Pemda Kota Cimahi dalam menertibkan dan mengatur PKL.....	67
Tabel 5.3 Wawancara Anggaran Pemda Kota Cimahi dalam menertibkan dan mengatur PKL.....	70
Tabel 5.4 Anggaran Pemda Kota Cimahi dalam menertibkan dan mengatur PKL	71
Tabel 5.5 Tabel wawancara Waktu Pemda Kota Cimahi dalam menertibkan dan mengatur PKL.....	73
Tabel 5.6 wawancara Tenaga Pemda Kota Cimahi dalam menertibkan dan mengatur PKL (sumberdaya manusia).....	76
Tabel 5.7 Tabel hasil wawancara Aturan yang di terbitkan oleh Pemda Kota Cimahi khusus untuk mengatur ketertiban dan keteraturan PKL	79
Tabel 5.8 wawancara Tindakan penertiban yang dilakukan Pemda Kota Cimahi untuk mengatur ketertiban dan keteraturan PKL	82
Tabel 5.9 wawancara Pengawasan yang dilakukan oleh Pemda Kota Cimahi untuk mengatur ketertiban dan keteraturan PKL	85
Tabel 5.10 wawancara Pembinaan yang dilakukan oleh Pemda Kota Cimahi untuk mengatur ketertiban dan keteraturan PKL	87
Tabel 5.11 wawancara Dampak dari oprasi ketertiban yang diterima oleh PKL..	91
Tabel 5.12 wawancara dampak dari patroli yang diterima oleh PKL.....	95
Tabel 5.13 wawancara dampak dari sidang yang diterima oleh PKL.....	100
Tabel 5.14 hasil wawancara dampak dari pembinaan yang diterima oleh PKL .	104
Tabel 5.15 wawancara Peraturan Pemda Kota Cimahi dalam penertiban dan pengaturan PKL menciptakan ketentaraman PKL	107
Tabel 5.16 wawancara Peraturan Pemda Kota Cimahi dalam penertiban dan pengaturan PKL berdampak pada kenyamanan PKL.....	109

Tabel 5.17 wawancara Peraturan Pemda Kota Cimahi dalam penetertiban dan pengaturan PKL berdampak pada keamanan PKL.....	113
Tabel 5.18 wawancara Peraturan Pemda Kota Cimahi dapat mengatur ketertiban dan keteraturan PKL.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.¹ Dengan begitu kebijakan publik perlu di analisis untuk melihat apakah tujuan dari kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut telah tercapai atau tidak. Evaluasi merupakan salah satu dari prosedur dalam analisis kebijakan publik. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi melakukan beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan.

First, and most important, evaluation provides reliable and valid information about policy performance, that is, the extent to which needs, values, and opportunities have been realized through public action. In this respect, evaluation reveals the extent to which particular goals and objectives have been attained. Second, evaluation contributes to the clarification and critique of values that underlie the selection of goals and objectives. Values are clarified by defining and operationalizing goals and objectives. Values are also critiqued by systematically questioning the appropriateness of goals and objectives in relation to the problem being addressed. In questioning the appropriateness of goals and objectives, analysts may examine alternative sources of values as well as their grounds in different forms of rationality. third, evaluation may contribute to the application of other policy-analytic methods, including problem structuring and recommendation. Information about inadequate policy performance may contribute to the restructuring of policy

¹ James E. Anderson, *Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), 12

*problems, for example, by showing that goals and objectives should be redefined. Evaluation can also contribute to the definition of new or revised policy alternatives by showing that a previously favored policy alternative should be abandoned and replaced with another one.*²

Dari penjelasan dunn maka evaluasi memiliki peran penting dalam menilai pencapaian tujuan dari sebuah kebijakan. dengan menilai capaian tujuan dari kebijakan maka dapat dihasilkannya Informasi yang berguna terhadap penerapan metode analisis-kebijakan lainnya, termasuk penetapan dan rekomendasi masalah. Evaluasi juga dapat berkontribusi dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang sebelumnya harus ditinggalkan dan diganti dengan yang lain. dengan begitu diharapkan masalah publik dapat di atasi dengan kebijakan yang lebih tepat dan lebih baik dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu penelitian evaluasi kebijakan publik penting untuk dilakukan.

Kota Cimahi merupakan salah-satu daerah di Jawa Barat dengan roda ekonomi dan kehidupan yang bergerak cukup cepat serta berkembang semakin maju, sehingga dibutuhkan pengelolaan pemerintahan yang tepat agar perkembangan tersebut dapat terkontrol dengan baik dan mampu menjadikan Kota Cimahi lebih sejahtera dan lebih maju. Kota yang sejahtera dan maju tentunya membutuhkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, hal ini menjadi tanggung-jawab dari Pemerintah Kota Cimahi sebagai pemegang otoritas Pemerintahan Daerah. Dalam mengatur ketertiban umum, Pemerintah Kota Cimahi menerbitkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang

² W.Dunn, *Public Policy Analysis : An Introduction 4th ed.* (New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2008), 353-354

Ketertiban Umum. Pada Peraturan Daerah Kota Cimahi tersebut dimaksudkan sebagai perangkat untuk memelihara, menegakkan dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menumbuhkan rasa tanggungjawab dan rasa memiliki terhadap Kota Cimahi, dan menciptakan tata kehidupan Kota yang tertib, teratur dan nyaman.³

Dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum, hal-hal yang diatur berkaitan dengan pokok penelitian ini adalah tentang Tertib Usaha yang dijelaskan dalam BAB VI Tertib Usaha Pasal 9 antara lain yang berbunyi, Setiap Orang atau Badan Hukum, dilarang : (a). Menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel Kereta Api, jalur hijau, Taman, dan tempat-tempat umum. (b). Menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, Taman, Hutan kota, Trotoar, dan tempat-tempat umum. (c). Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya.

Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Cimahi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum dengan pasal 9 yang di ubah kurang lebih menjadi. Setiap Orang atau Badan Hukum, dilarang: (a). menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel Kereta Api, jalur hijau, Taman, dan tempat-tempat umum, (b).

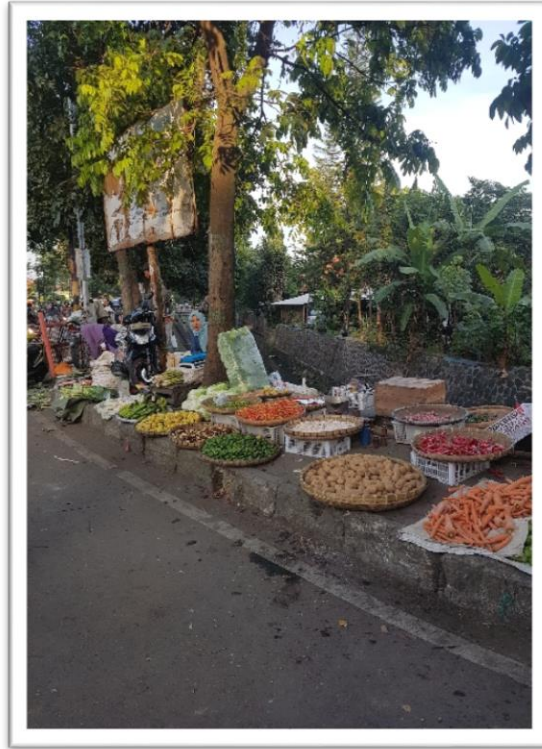
³ Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum

menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, Taman, Hutan kota, Trotoar, dan tempat umum, (c). melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya.⁴ Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Cimahi 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum, diharapkan dapat mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menumbuhkan rasa tanggungjawab dan rasa memiliki terhadap Kota Cimahi.

Namun pada kenyataannya meskipun telah di rubah dan diimplementasikan selama 10 tahun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam implementasinya tidak berjalan dengan baik. Salah satunya adalah kasus keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan fasilitas umum sebagai tempat usaha menjadikan ketentraman maupun ketertiban di Kota Cimahi menjadi jauh dari harapan. Aktivitas pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum seperti jalur pejalan kaki dan bahu jalan seakan telah menjadi suatu hal yang lumrah dan dapat di amati setiap hari di Kota Cimahi, terutama di ruas jalan Sriwijaya Raya, yang menjadi fokus dari lokasi penelitian ini. Kawasan tersebut peneliti jadikan sebagai lokasi penelitian karena di lokasi tersebut seringkali terjadi kemacetan dan mengakibatkan gangguan kenyamanan bagi pengguna jalan maupun trotoar yang disebabkan oleh banyaknya pedagang kaki lima. Walaupun seringkali dilakukan razia oleh jajaran Satuan Polisi

⁴ Peraturan Daerah Kota Cimahi 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum

pamong Praja (Satpol-PP), namun dua atau tiga hari pasca razia para pedagang kaki lima tersebut selalu kembali menggelar dagangannya.⁵



Gambar 1. 1 PKL Jalan Sriwijaya ⁶

⁵ Berdasarkan hasil wawancara anggota polisi pamong praja Kota cimahi pada tanggal 20 oktober 2017 pukul 10.00 WIB

⁶ Sumber : Dokumentasi peneliti

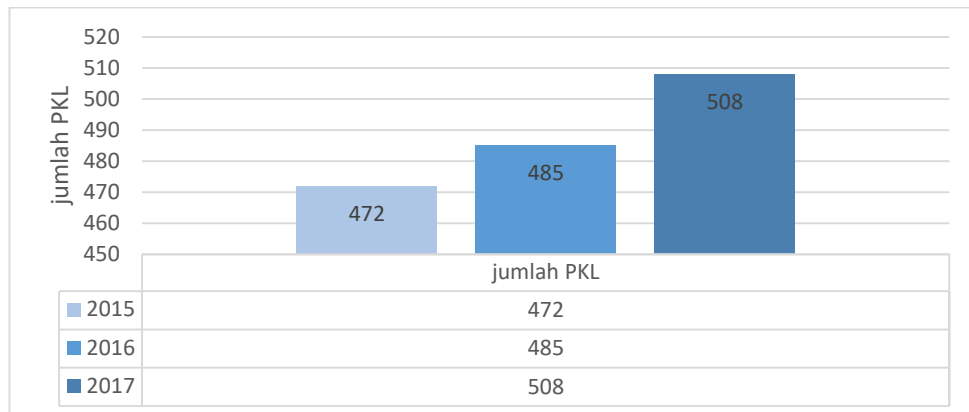


Gambar 1. 2 Kondisi jalan Sriwijaya⁷

Permasalahan tentang pelanggaran Peraturan Daerah Kota Cimahi no 4 Tahun 2004, khususnya pasal 9 yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, dipertegas dengan hasil observasi awal, “Berdasarkan data dari salah satu anggota Satpol-PP kota Cimahi, pada tahun 2016 diketahui bahwa jumlah PKL yang terjaring operasi penertiban di Kota Cimahi mencapai angka 485 pedagang. Jumlah ini kemudian meningkat pada tahun 2017, sampai bulan September diketahui bahwa terdapat 508 pedagang yang sudah terjaring dalam operasi penertiban.⁸” Ironisnya, PKL yang terjaring operasi penertiban pada tahun 2017 adalah PKL yang sama yang terjaring pada operasi penertiban tahun 2016.

⁷ Sumber : Dokumentasi Peneliti

⁸ Berdasarkan hasil wawancara anggota polisi pamong praja Kota cimahi pada tanggal 20 oktober 2017 pukul 10.00 WIB



Gambar 1. 3 Data PKL Pelanggar Perda⁹

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang ketertiban dalam usaha yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, masih sering terjadi. maka jelaslah bahwa ketertiban umum yang menjadi tujuan dari di terbitkannya Peraturan Daerah tersebut belum tercapai secara maksimal bahkan ironisnya telah hampir 10 tahun peraturan tersebut diimplementasikan *gap* antara harapan dengan kenyataan masih besar.

Oleh karenanya, perlu untuk dilakukan sebuah analisis evaluasi untuk menilai kinerja dari suatu kebijakan, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur kelayakan dari suatu kebijakan publik. Evaluasi diterapkan secara retrospektif (*ex post*). Dalam menghasilkan informasi tentang kinerja kebijakan, penulis menggunakan kriteria evaluasi untuk mengevaluasi hasil

⁹ Buku laporan pelanggar prerda Satpol PP 2015-2017

kebijakan dari W.Dunn yaitu: *effectiveness, efficiency, adequacy, equity, Responsiveness, dan appropriateness*.¹⁰

Maka berlandaskan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melaksanakan penelitian ilmiah dengan tema *Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan urain yang diulas pada bagian latar belakang masalah, maka pertanyaan penelitian yang akan diangkat adalah:

1. Mengapa masih ada PKL yang berdagang ditempat yang dilarang perda?
2. Bagaimanakah kinerja kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 terhadap ketertiban usaha Pedagang Kaki Lima di tinjau dari *effectiveness, efficiency, adequacy, equity, Responsiveness, dan appropriateness*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian untuk mengevaluasi kinerja kebijakan yaitu, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum,

¹⁰W.Dunn, *Public Policy Analysis : An Introduction 4th ed*, Op.Cit, 221

terhadap ketertiban usaha Pedagang Kaki Lima. Ditinjau dari kriteria kebijakan *effectiveness, efficiency, adequacy, equity, Responsiveness, dan appropriateness*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Memberikan informasi mengenai evaluasi dari Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum terhadap ketertiban usaha Pedagang Kaki Lima sebagai masukan bagi pemerintah Kota Cimahi dalam mengawasi dan menertibkan pedagang kaki lima, demi terciptanya ketertiban, keteraturan Pedagang Kaki Lima.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, pokok bahasan yang dibahas adalah:

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan mengenai pengertian kebijakan publik, implementasi, implementasi kebijakan, fokus implementasi, dan sumber kepatuhan dan ketidakpatuhan.

BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan mengenai rancangan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan oprasional variabel.

BAB IV GAMBARAN UMUM, menjelaskan mengenai Profil Dinas (dari dinas terkait dengan masalah)

BAB V ANALISIS DATA, menjelaskan mengenai analisis berdasarkan 6 aspek pendekatan kepatuhan (compliance approach) yaitu: Insentif dan Sanksi, Pemantauan, sumberdaya, Otonomi, Informasi, Perilaku dan Nilai.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran